

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Keberadaan UKM (Usaha Kecil Menengah) hendaknya dapat memberikan kontribusi khusus dalam masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan UKM jadi salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, tapi untuk saat ini para pelaku UKM masih kesulitan dalam mengakses modal.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM hingga 2013 mencapai sekitar 57 juta atau 99% dari total jumlah unit usaha pada tahun 2013. UMKM ini juga sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena UMKM sendiri menyumbang 60% dari PDB atau sebesar 5,4 milyar dan menampung 96% tenaga kerja (Data UMKM 2013). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peran tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah relatif besar dan jumlah usaha kecil dan menengah sangat dominan. Dengan demikian usaha kecil dan menengah sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Partono dan Soejoeno (2002), dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Sementara itu, sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor UKM. Pada saat krisis ekonomi UKM mampu bertahan, artinya sektor ini mempunyai keunggulan dalam pengembangannya melalui suatu kebijakan dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi UKM adalah masalah permodalan dimana ketika meminjam dana di bank mengalami kesulitan karena adanya suku bunga kredit yang tinggi dan harus adanya jaminan kebendaan yang sukar dipenuhi.

Kredit khusus UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah sejak era orde baru, diawali dengan dua skema kredit Bank Indonesia yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil) pada tahun 1970-an. Diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang BI, Program kredit dialihkan ke PT Permodalan Nasional Mandiri. Selain PNM dan bank Komersial UKM juga mendapatkan kredit dari lembaga lembaga keuangan non bank di antaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Baitul Maal Wattanwil, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat. Namun demikian masih banyak UMKM yang belum terlayani oleh lembaga-lembaga keuangan formal. Beberapa penyebabnya yaitu kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit dari bank misalnya tidak

mempunyai agunan. Masalah agunan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha. Pada umumnya pemilik UKM berasal dari keluarga-keluarga miskin yang aset nya berupa rumah tanah tidak memenuhi jaminan untuk kredit di bank.

Berbagai fenomena yang terjadi dari dampak krisis ekonomi atau lemahnya taraf hidup “wong cilik” yang jauh dari pemenuhan kebutuhan layak, mendorong adanya sebuah lembaga keuangan syari’ah alternatif dan sebuah lembaga keuangan yang berorientasi tidak hanya pada bisnis tapi pada sosial juga. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan pada jumlah kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal akan tetapi merata secara adil dan tidak mengesampingkan kalangan miskin untuk menjadi anggotanya. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat yang ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas yaitu pengusaha kecil. Lembaga ini juga tidak terjebak pada permainan bisnis pribadi tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Banyak Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM, seperti pinjaman lunak, kredit tanpa agunan dan lain lain namun pelaksanaannya masih kurang maksimal. Oleh karena itu leberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro akan membantu menyelesaikan persoalan kredit seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Menurut Harry (2001) menjelaskan pemberdayaan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling menmpercayai, kurang daya inovasi / kreativitas, mudah pasrah / menyerah putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja,

wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terkait pada tempat kediamannya dan tidak mampu / tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah memutuskan mata rantai kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan kelompok melalui pengembangan micro finance institution (lembaga keuangan mikro / LKM). Yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Secara khusus LKM merupakan jalan efektif dalam membantu dan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi keluarga (Diodawati, 2004). Di samping itu LKM merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Banyak perhatian dan usaha dalam mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan (Amalia, 2009).

Pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang bersifat tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi. Dengan pembiayaan yang ada masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal dan meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori masyarakat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang

bersifat Qardhul Hasan yaitu nasabah hanya mengembalikan dana pinjaman saja tanpa adanya bunga. Dengan konsep ini BMT dapat membantu masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan tidak tergantung pada subsidi dari pemerintah dan mampu meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian simpan pinjam yang dilakukan BMT dilandasi unsur kebersamaan dan tanggung jawab moral guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini skema seperti qardhul hasan yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan memang menjadi ciri khas BMT. Skema ini terutama untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu dana bagi hasil dipercayakan kepada BMT untuk disalurkan kepada nasabah. Skema qardhul hasan sifatnya bisa bergulir jika diperuntukkan bagi sektor usaha produktif. Dan tidak semua pengusaha UKM bisa mendapatkan dana qardhul hasan karena harus melalui seleksi yang ketat untuk bisa mendapatkan dana tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dengan adanya produk pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam mengatasi masalah modal untuk pengembangan usahanya dapat berkembang dan kehidupan mereka pun dapat menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai peneliti terdahulu yang terkait tentang pembiayaan Qardhul Hasan, pembinaan pemberdayaan dan kinerja usaha kecil menengah diantaranya adalah Menurut Widiyanto (2011) yang menemukan hasil adanya perbedaan pendapat dan keuntungan yang cukup signifikan dari pendapatan usaha dan keuntungan yang dari penerima pembiayaan Qardhul Hasan.

Alamgir (2000) menyatakan bahwa pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Paili Karma Sahayak Foundation melalui program partner organization berkontribusi dalam meningkatkan hidup dan menciptakan keuntungan bagi penerima pembiayaan. Afrane (2003) juga menyebutkan bahwa skema kredit berpengaruh positif terhadap pemberdayaan wanita, kinerja bisnis diukur dengan meningkatnya turnover dan menekankan kompetensi wanita dalam mengembangkan usaha. Dari beberapa hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun (2010) bahwa pembiayaan Qardhul Hasan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap perkembangan usaha kecil, tetapi masih membantu dalam penambahan modal dan kelangsungan hidup usaha.

Hasil penelitian yang dilakukan Aryo (2011) bahwa adanya pengaruh positif pembinaan usaha kecil pengrajin kerupuk terhadap pemberdayaan usaha kecil. Menurut Liana (2008) Apabila pembinaan dan pengembangan terhadap UK berhasil dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu dan berkesinambungan maka dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji **“Model Pemberdayaan Dan Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, maka secara spesifik perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan qardhul hasan terhadap peningkatan kinerja UKM ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan qardhul hasan terhadap pemberdayaan UKM?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan UKM terhadap peningkatan kinerja UKM ?
4. Bagaimana pengaruh pembinaan UKM terhadap pemberdayaan UKM?
5. Bagaimana pengaruh pembinaan UKM terhadap peningkatan kinerja UKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan qardhul hasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap peningkatan kinerja UKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian dibidang manajemen keuangani syaria'ah. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu manajemen khususnya keuangan syaria'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak manajemen keuangan syari'ah, penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang digunakan dalam mempertimbangkan peranan qardhul hasan pada BMT.
- b. Untuk dapat dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sebuah info atau gambaran mengenai qardhul hasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan tersebut.